

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- _____, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Amiroeddin Syarief dalam Rojidi Ranggawijaya. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bagir Manan. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni
- Bambang Eka Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dudu Duswara Mahmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa*. Bandung. Refika.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Reflika Agung.

Fence M. Wantu Dkk. 2002. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Reviva Cendekia.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

G.J. Wolhoff. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia

Hariadi Kartodihardjo. 2013. *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan*. Sleman Yogyakarta. Forci Development.

Moeljatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Robert W Shaffern. 2009. *Law and Justice from Antiquity Enlightenment*. Maryland. Rowman and Littlefield Publishers.

Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Jurnal

A Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Studi
Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan
dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*. Disertasi Doktor,
Universitas Indonesia. Jakarta

Antoni Putra, 2020. *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi
Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1 2020, hal 223

Muhammad Badai. 2022. *Implikasi Penetapan Hutan Konservasi Laposo*, Universitas Hasanuddin; Makassar.

Rusli Rusli. 2014. Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini*.

Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*.

Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hal. 117

Internet

<https://rimbaindonesia.id/artikel-utama/catatan-tentang-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-terkait-perubahan-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2013-tentang-p3h-tinjauan/>
diakses Rabu 10 april 2023 Pukul 10.40 wita

M. Daud Silalahi, 2020 Omnibus Law Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat, <http://www.google.com/amp/s/www.dslawfirm.com/omnibus-law/> diakses tanggal 7 Desember 2020. Di akses pada Pukul 22.21 Wita

M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibuslaw, <http://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi->

mengeluarkan omnibus-law-126037 diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul 22.21 Wita

Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya (detik.com)

Paulus Aluk Fajar Dwi santoso, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/> diakses tanggal 7 Desember 2020.

Perlu Penegasan Norma Ultimum Remedium Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja (hukumonline.com)

Yudho Winarto, 2020, jika-ada-pasal-cipta-kerja-bermasalah-ajukan-uji-materi-ke-mk, <https://nasional.kontan.co.id/news/>. Diakses tanggal 03 November 2022

Yudo, 2020, Apa itu Omnibus?, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020